

# Berita Resmi Statistik

## Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)



**BADAN PUSAT  
STATISTIK**



**Kementerian PPN/  
Bappenas**





**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI BANTEN**

# Fenomena Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Banten

**2018**

No.40/07/36/Th.XIII, 29 Juli 2019

**Pelopor  
Data Statistik  
Terpercaya  
Untuk Semua**

**SENSUS  
EKONOMI**  
2016

2



## LATAR BELAKANG

IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia

IDI adalah *Fact-Based Information*, bagian dari upaya mengembangkan *a culture of evidence-based decision making*, yang sesuai deklarasi dunia tentang statistik di Istanbul, Turki 2008 (*has to be promoted at all levels of governments*)

Setiap angka IDI mempunyai makna yang terkandung di balik semua indikator yang digunakan

# KERJASAMA




“  
IDI  
merupakan  
usaha  
bersama  
sejak tahun  
2009 antara:



- ▶ Badan Pusat Statistik (BPS)
- ▶ Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (KEMENKOPOLHUKAM)
- ▶ Badan Perencanaan Dr. Syarif Hidayat (LIPI) Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
- ▶ Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI)
- ▶ Tim Ahli yaitu:
  - ▶ Prof. Maswadi Rauf (UI)
  - ▶ Prof. Musdah Mulia (UIN Syarif Hidayatullah)
  - ▶ Dr. Abdul Malik Gismar (Universitas Paramadina)

# KOMPONEN PENGHITUNGAN IDI

Komponen IDI terdiri atas 3 Aspek, 11 Variabel dan 28 Indikator

Aspek	Variabel	Indikator
<b>Kebebasan Sipil</b> 	1. Kebebasan Berkumpul dan Berserikat	2 indikator
	2. Kebebasan Berpendapat	2 indikator
	3. Kebebasan Berkeyakinan	3 indikator
	4. Kebebasan dari Diskriminasi	3 indikator
<b>Hak-Hak Politik</b> 	5. Hak Memilih dan Dipilih	5 indikator
	6. Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan Pemerintahan	2 indikator
<b>Lembaga Demokrasi</b> 	7. Pemilu yang Bebas dan Adil	2 indikator
	8. Peran DPRD	3 indikator
	9. Peran Partai Politik	2 indikator
	10. Peran Birokrasi Pemerintah Daerah	2 indikator
	11. Peradilan yang Independen	2 indikator

# SUMBER DATA

## Dokumen

Berupa Perda, Pergub, Perbup, Surat Edaran, dsb



## Surat Kabar

Satu per provinsi dengan oplah terbesar atau jangkauan terluas

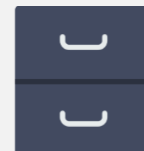
## Focus Group Discussion (FGD)

Untuk mengkonfirmasi dan menambah informasi dari stakeholder

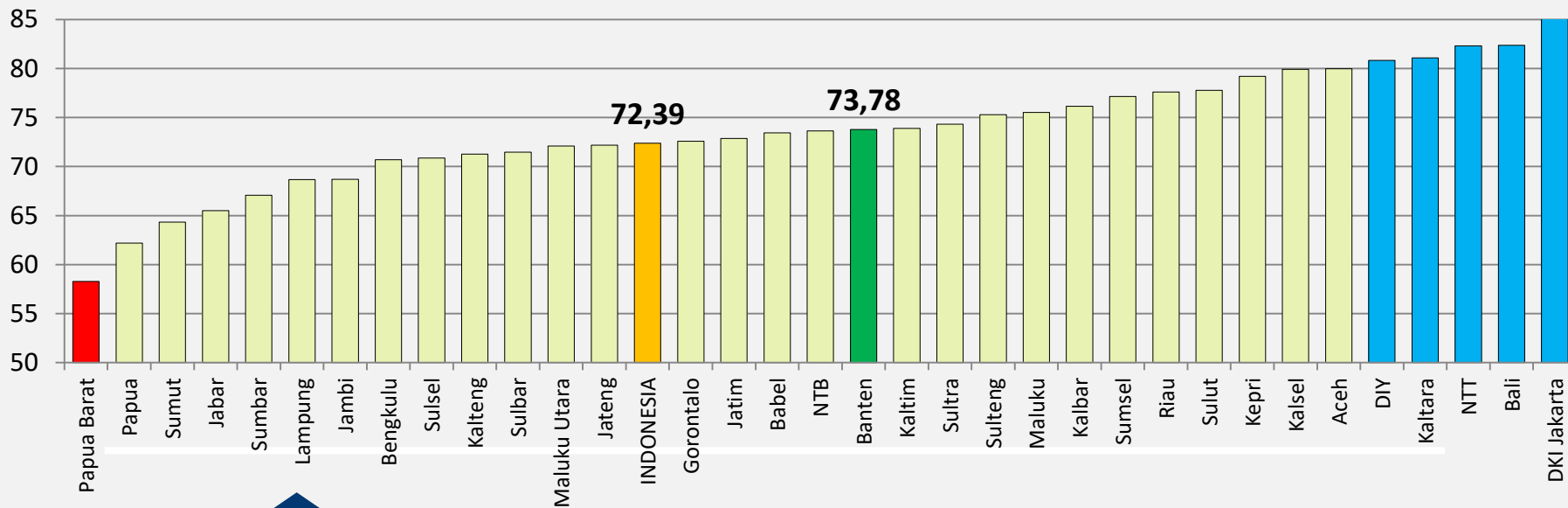


## Wawancara Mendalam (WM)

Untuk mengkonfirmasi dan menambah informasi dari narasumber/ahli

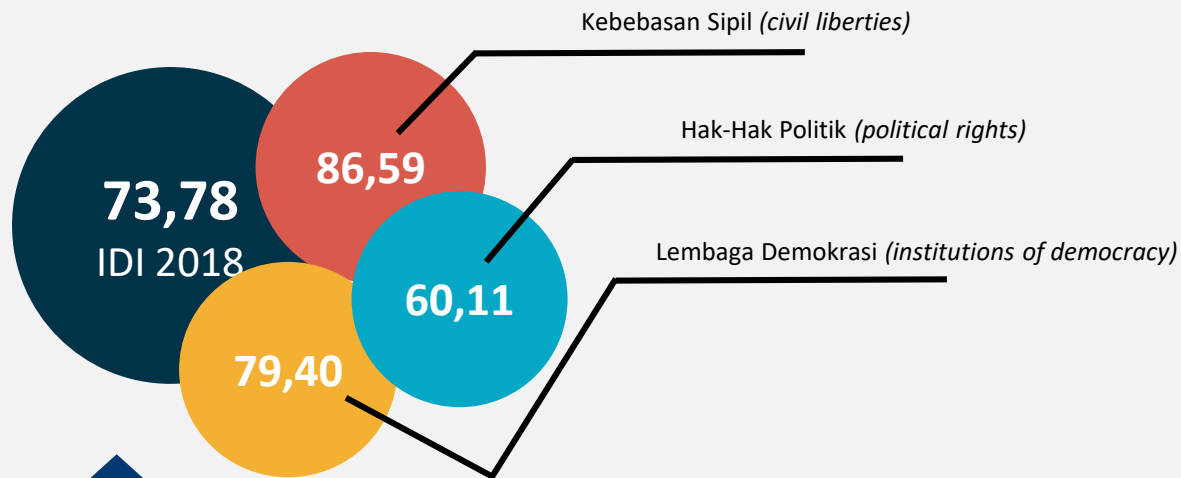


# IDI 2018



- Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2018 mencapai **72,39**.
- IDI Banten berada di peringkat 17 Nasional.

## ► IDI BANTEN 2018



- Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Banten tahun 2018 mencapai **73,78**; naik 0,06 poin dibandingkan tahun 2017.
- Aspek IDI Banten yang mengalami peningkatan terjadi pada aspek **Kebebasan Sipil** dan aspek **Lembaga Demokrasi**



## PERKEMBANGAN INDEKS ASPEK IDI BANTEN, 2017-2018

- Indeks Aspek Kebebasan Sipil pada 2018 sebesar 86,59 meningkat 1,43 poin dibanding 2017, dan masuk kategori BAIK.
- Indeks Aspek Hak-hak Politik sebesar 60,11 menurun 3,76 poin dibanding 2017 dan masuk kategori SEDANG.
- Indeks Aspek Lembaga Demokrasi sebesar 79,40 naik 4,41 poin, dan menempatkan aspek ini dalam kategori SEDANG.

# PERKEMBANGAN INDEKS VARIABEL IDI BANTEN, 2017-2018

- Indeks variabel yang mengalami kenaikan: II, VIII, IX dan X (4 variabel)
- Indeks variabel yang mengalami penurunan: IV dan VI (2 variabel)

Pada tahun 2018, variabel VI dan X masih berada di kategori “buruk”

No	Nama Variabel	2017	2018	Selisih
I	Kebebasan Berkumpul dan Berserikat	100	100	-
II	Kebebasan Berpendapat	75,70	↗ 100	24,30
III	Kebebasan Berkeyakinan	78,45	78,45	-
IV	Kebebasan dari Diskriminasi	100	↘ 96,53	-3,47
V	Hak Memilih dan Dipilih	77,73	77,73	-
VI	Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan	50	↘ 42,48	-7,52
VII	Pemilu yang Bebas dan Adil	88,49	88,49	-
VIII	Peran DPRD	42,89	↗ 61,98	19,09
IX	Peran Partai Politik	99,46	↗ 100	0,54
X	Peran Birokrasi Pemerintah Daerah	47,53	↗ 49,94	2,41
XI	Peran Peradilan yang Independen	100	100	-

## PERKEMBANGAN SKOR INDIKATOR ASPEK KEBEBASAN SIPIL

No.	Indikator	2017	2018
01	Ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	100	100
02	Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	100	100
03	Ancaman /penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat	70,83	100
04	Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat	100	100
05	Aturan tertulis yang membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama	69,57	69,57
06	Tindakan/pernyataan pejabat yang membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama	100	100
07	Ancaman/penggunaan kekerasan dari satu kelompok terkait ajaran agama	100	100
08	Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, kelompok	100	100
09	Tindakan/pernyataan pejabat yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, kelompok	100	87,50
10	Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis, kelompok	100	100

- o 1 dari 10 indikator dalam Aspek Kebebasan Sipil mengalami penurunan, yaitu indikator 3
- o Indikator 3 mengalami peningkatan kategori, dari “sedang” menjadi “baik”

# PERKEMBANGAN SKOR INDIKATOR ASPEK HAK-HAK POLITIK

No.	Indikator	2017	2018
11	Hak memilih atau dipilih terhambat	99,36	99,36
12	Ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih	60,00	60,00
13	Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT)	77,12	77,12
14	<i>Voters turnout</i>	70,83	70,83
15	Persentase anggota perempuan DPRD provinsi	66,67	66,67
16	<b>Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan</b>	0	0
17	Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan	100	↘ 84,95

- **1 dari 7 indikator di Aspek Hak-hak Politik mengalami penurunan**
- **Indikator 16 masih termasuk dalam kategori “buruk”**

## PERKEMBANGAN SKOR INDIKATOR 2015-2016 ASPEK LEMBAGA DEMOKRASI

No.	Indikator	2017	2018
18	Keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu	90,91	90,91
19	Kecurangan dalam penghitungan suara	86,08	86,08
20	Alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan	51,55	↗ 62,36
21	Perda yang merupakan inisiatif DPRD	44,44	↗ 100
22	<b>Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif</b>	<b>10,71</b>	<b>↗ 28,57</b>
23	Kegiatan kaderisasi yang dilakukan partai peserta pemilu	100	100
24	Persentase perempuan pengurus partai politik	94,56	↗ 100
25	Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN	84,21	↗ 89,47
26	<b>Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah</b>	<b>16,66</b>	<b>16,66</b>
27	Keputusan hakim yang kontroversial	100	100
28	Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi	100	100

- 5 dari 11 indikator di Aspek Lembaga Demokrasi mengalami peningkatan
- Indikator 22, dan 26 masih termasuk dalam kategori “buruk”

## KESIMPULAN

- 1 Secara umum, **Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Banten 2018 naik** sebagai akibat peningkatan aspek kebebasan sipil dan aspek lembaga demokrasi. Namun demikian, IDI Banten masih dalam kategori sedang.
- 2 **Aspek Kebebasan Sipil meningkat** disebabkan oleh meningkatnya kebebasan berpendapat di masyarakat.
- 3 **Aspek Hak-Hak Politik menurun** disebabkan berkurangnya pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan.
- 4 **Peningkatan nilai Indeks Aspek Lembaga Demokrasi** disebabkan oleh meningkatnya kinerja peran DPRD dan partai politik, serta peran birokrasi pemerintah daerah yang ditandai dengan berkurangnya jumlah kebijakan pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh PTUN.
- 5 **Peningkatan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Banten 2018 harus diwaspadai**, karena **dalam demokrasi tidak ada hal yang konstan/stabil**. Perkembangan demokrasi sangat tergantung pada kondisi yang terjadi di masyarakat. Dituntut peran besar pemerintah dalam menjaga stabilitas dan kondusifitas masyarakat.



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI BANTEN**



**(0254) 267027**



**(0254) 267026**



**[bps3600@bps.go.id](mailto:bps3600@bps.go.id)**



**KP3B Kav. H1-2, Jl. Syekh Nawawi Al Bantani Serang 42171**

# TERIMA KASIH